

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2011. *Indikator Sosial Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- _____. 2012. *Lima Indikator Kinerja Utama Pembangunan*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- _____. 2015. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- _____. 2016. *Kabupaten Madiun Dalam Angka*. Kabupaten Madiun: BPS Kabupaten Madiun.
- _____. 2016. *Kabupaten Magetan Dalam Angka*. Magetan: BPS Kabupaten Magetan.
- _____. 2016. *Kabupaten Ngawi Dalam Angka*. Ngawi: BPS Kabupaten Ngawi.
- _____. 2016. *Kabupaten Pacitan Dalam Angka*. Pacitan: BPS Kabupaten Pacitan.
- _____. 2016. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- _____. 2016. *Kota Madiun Dalam Angka*. Madiun: BPS Kota Madiun.
- _____. 2016. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Burton, Richard. dan Wirawan, B. Ilyas. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Buku Panduan Keuangan Daerah*. Jakarta: DPU.
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Brama Ardian.
- Hadisaputro, Mandar Trisno. 2012. *Belanja Barang dan Belanja Modal*. Bandung: TP.
- Halim, Abdul. dan M. Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 4.

- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendaris, R. Budi. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat)*. Jurnal Ilmu dan riset akuntansi Volume 9 No. 2, Nopember 2012.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, D. Septian. 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Parlindungan, Ricardo, dkk. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus Pemerintahan Kota Palembang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol. 1. No. 2. 2016.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Depok: Erlangga.
- Putriasani, Novia Nur. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Belanja Pemeliharaan*. Bandung: Unikom.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. cet. 22. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Trisulo, Fitra Bambang, dan Lilis Ardini. *Pengaruh Kepatuhan Dan Efektivitas Pengendalian Intern Pada AJB Bumiputra Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 3 No. 9 2014.

Widjajanta, Bambang, dkk. 2009. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Edisi 2. Jakarta: Citra Praya.

Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010. *Tentang Retribusi Jasa Umum*.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010. *Tentang Retribusi Jasa Usaha*.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Umum*.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 02 Tahun 2012. *Tentang Retribusi Jasa Usaha*.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2000. *Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2000. *Tentang Retribusi Jasa Usaha.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2000. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 06 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 07 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha.*

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

ksbhumas@bpk.go.id alamat e-mail Badan Pemeriksa Keuangan diakses pada tanggal 21 Juli 2018 Pukul 14.15 WIB.